

DAFTAR PUSTAKA

- Budhiman, A., 2010, "Pengaruh Konflik Peran, Ketidakjelasan Peran Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Auditor", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Coryanata, I., 2007, "Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)", *Makalah Simposium Nasional Akuntansi*, Makassar.
- Darpito, M., 2011, "Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran dan Kinerja Dewan Terhadap Pengawasan APBD Dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Ghozali, I., 2005, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Andi, Jogjakarta.
- Nazaruddin, I., 2003, *Praktek Komputer Statistika*, UPFE, Yogyakarta.
- Pratomo, N., 2010, "Pengaruh Tingkat Pengetahuan Anggaran dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Kepuasan Masyarakat Atas Pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja Dengan Efektivitas Partisipasi Sebagai Variabel Intervening", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Prayonggo, B., 2010, "Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan masyarakat atas pelaksanaan anggaran berbasis kinerja", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Pusdianto, S.N., 2008, "Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan

Tentang Anggaran Dengan Pengawasan APBD”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Republik Indonesia, 1998, *Ketetapan majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; Serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia*.

_____, 2001, *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah daerah*.

_____, 2004, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*. Jakarta : Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

_____, 2004, *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta : Diperbanyak oleh Departemen Komunikasi dan Informatika.

Sardjito, B., dan Muthaher, O., 2007, “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah : Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi sebagai Variabel Moderating”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi X*, Makasar.

Rosseptalia, R., 2006, “Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah dengan Variabel Moderating Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Sopannah, 2002, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan APBD”, *Tesis*, Program Pasca Sarjana UGM, Yogyakarta.

Sopannah dan Mardiasmo, 2003, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik terhadap Hubungan antara

Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dengan Pengawasan Keuangan Daerah”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.

Sopiah, 2008, “Dukungan Penerapan Prinsip-prinsip Good Government governance Dalam Pencapaian Kinerja Pemerintah”, *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Werimon, S., dkk., 2007, “Pengaruh Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)”, *Makalah Simposium Nasional Akuntansi V Makassar*